

**LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA (LKPPD)
TAHUN 2025**

PEMERINTAH DESA	:	PEMARON
KECAMATAN	:	BULELENG
KABUPATEN	:	BULELENG

SEKRETARIAT JALAN DEWA PUTU KERTHA, DESA PEMARON

contact: 081214552699

PUTU MERTAYASA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Ida Sanghyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun 2025. Sebagaimana kita ketahui bahwa Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan ketentuan Undang-undang yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) Akhir Tahun merupakan bentuk tanggungjawab kami secara administrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa selama satu tahun. Dalam penyusunan LKPPD akhir tahun ini, salah satu cara yang kami gunakan adalah mengumpulkan data dari berbagai pihak mulai dari Perangkat Desa, Lembaga Desa, hingga menggali potensi yang ada di masyarakat melalui identifikasi masalah sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tahun berikutnya.

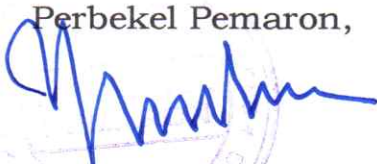
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang sudah turut serta membantu dalam menyelenggarakan pemerintahan desa selama satu tahun, dan juga pihak yang sudah mendukung dalam penyelesaian LKPPD ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mohon saran dan masukan dari berbagai pihak terutama dari anggota BPD sehingga kami dapat memperbaikinya pada tahun berikutnya.

Semoga Laporan ini dapat mendorong masyarakat desa untuk mewujudkan cita-cita dan rasa memiliki yang tinggi dengan keikutsertaan dalam setiap kegiatan desa dan semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi Pemerintah Desa Pamaron serta semua pihak yang berkepentingan.

Pamaron, 10 Maret 2026

Perbekel Pamaron,


PUTU MERTAYASA


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii - iii
<u>BAB I</u> PENDAHULUAN	1-4
A. Latar Belakang	
B. Tujuan Penyusunan Laporan	
C. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
D. Strategi dan Kebijakan	
<u>BAB II</u> KEBIJAKAN PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA DAN PELAKSANAANNYA	5-14
A. Kebijakan Program Kerja dan Pelaksanaan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
B. Kebijakan Program Kerja dan Pelaksanaan Bidang Pembangunan	
C. Kebijakan Program Kerja dan Pelaksanaan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
D. Kebijakan Program Kerja dan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
<u>BAB III</u> KEBIJAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DESA	15-27
A. Pengelolaan Pendapatan Desa	
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi	
2. Target dan Realisasi Pendapatan	
3. Permasalahan dan Penyelesaian	
B. Pengelolaan Belanja Desa	
1. Kebijakan Umum Keuangan Desa	
2. Target dan Realisasi Belanja	
3. Permasalahan dan Penyelesaian	
C. Pembiayaan Desa	
1. Penerimaan Pembiayaan	
2. Pengeluaran Pembiayaan	
3. Selisih Pembiayaan	
4. SILPA Akhir Tahun	

**BAB IV KEBERHASILAN YANG DI CAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
DAN UPAYA YANG DITEMPUH 28-29**

- A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- B. Bidang Pembangunan
- C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

BAB V PENUTUP 30

- A. Kesimpulan Laporan
- B. Saran

Pemaron, 28 Maret 2026

Perbekel Pemaron



PUTU MERTAYASA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran tersebut, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di kabupaten, maka sebuah desa diharuskan membuat Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) sebagai tolok ukur keberhasilan yang dicapai oleh Pemerintah Desa dalam satu tahun.

Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dimaksudkan agar kebijakan Pemerintah Desa Pamaron menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua yang dilakukan Pemerintah Desa Pamaron dalam akhir tahun bisa dilaporkan kepada Badan Permasyarakatan Desa (BPD).

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) akhir tahun merupakan penjabaran kinerja Pemerintah Desa selama periode 1 (satu) tahun yang memuat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sekaligus melaporkan capaian kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun, prestasi yang dicapai, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

B. Tujuan Penyusunan Laporan

Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun mempunyai tujuan sebagai berikut:

- Agar desa memiliki dokumen LKPPD akhir tahun yang berkekuatan hukum tetap.
- Sebagai dasar/pedoman evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa pada tahun berikutnya.
- Untuk tolok ukur pencapaian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setiap akhir tahun.

C. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Tantangan birokrasi Pemerintah Desa di masa depan meliputi berbagai aspek baik yang bersifat alamiah maupun Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan & Keamanan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Agama.

Seiring dengan penerapan Otonomi Daerah yang luas dan bertanggungjawab, maka diperlukan suatu pemerintahan desa yang berkualitas dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan yang *Good Government* sesuai tuntutan masyarakat. Guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Pemerintah Desa harus memiliki visi dan misi ke depan.

Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal), dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Setiap organisasi selalu mempunyai harapan jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi itu akan dibawa serta bekerja, agar tetap eksis dan konsisten. Penyusunan Visi Desa Pamaron dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, LPMD, tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan potensi dan nilai-nilai budaya yang ada dan tumbuh di masyarakat.

VISI DESA

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Visi Desa

Pemaron dilakukan dengan pendekatan partisipatif, dengan melibatkan pihak-pihak terkait dari Pemerintah desa, BPD, Tokoh masyarakat, lembaga masyarakat desa dan masyarakat serta kelompok peduli lainnya. Visi desa adalah:

“TERWUJUDNYA DESA PEMARON YANG SEJAHTERA, MAJU, MANDIRI, DAN BERBUDAYA BERLANDASKAN FALSAFAH AJEG BALI SANTHI”

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pemaron bersama masyarakat secara partisipatif menuju pada Visi Desa. Penjabaran dan penjelasan visi Desa Pemaron Tahun 2020 – 2027 diatas adalah sebagai berikut :

1. SEJAHTERA, yang dimaksud dengan sejahtera adalah keadaan yang baik dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai;
2. MAJU, yang dimaksud dengan maju adalah bergerak ke depan menjadi lebih baik dari sebelumnya;
3. MANDIRI, yang dimaksud dengan mandiri adalah dalam keadaan dapat berdiri sendiri tidak bergantung pada orang lain;
4. BERBUDAYA, yang dimaksud dengan berbudaya adalah suatu keadaan hidup yang berkembang yang dimiliki bersama oleh kelompok dan diwariskan kegenerasi berikutnya;
5. FALSAFAH AJEG BALI SANTHI, yang dimaksud dengan falsafah ajeg bali santhi adalah hubungan bali yang kokoh, teratur, tegak, mantap , dan tidak berubah untuk mencapai kedamaian.

MISI DESA

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, Misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi serta kebutuhan Desa Pemaron , sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Pemaron adalah :

“ Dengan Simbol “ NAWA CITTA ” / Sembilan langkah strategi mengwujudkan Visi yang akan dituangkan 2020 – 2027 di RPJM Des .

1. Mengoptimalkan pelayanan yang prima ke Pada Masyarakat di dalam pengurusan surat – menyurat , Adminitrasi ke Pendudukan dengan cepat Propsional tanpa pambrih (gratis)

2. Menjaga kebersihan, kenyamanan lingkungan Desa dan rumah tangga untuk mengujudkan kenyamanan, Keindahan serta menata pontensi – pontensi yang menunjang Pariwisata.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang siap bersaing baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri dengan memberikan pelatihan – pelatihan Generasi Muda. Serta menyediakan sarana prasarana olah Raga, TK / Paud dan kesenian Adat Budaya Bali
4. Memotivasi dan memberikan Rangsangan kepada Masyarakat untuk membuka atau menambah Usaha- usaha kecil dan menengah.
5. Meningkatkan dan Menjaga kesehatan masyarakat dengan Pos Yandu Balita dan Lansia setiap bulan, Periksa Ibu hamil , optimalkan kader Jumatik serta melaksanakan Fogging Massal , Mempalitasi Pengurusan Kartu Kis, Kip serta Pemberian sembako kepada lansia dan Masyarakat kurang mampu.
6. Bersenergi dengan Desa adat untuk memajukan kesenian Adat Budayasupaya tetap Ajeg dan Lestari.
7. Menggali pontensi Desa untuk di kembangkan menjadi usaha- usaha Desa yang akan di kelola oleh BUMDES yang nantinya dapat meningkatkan PAD Desa dan untuk mensejahtrakan Masyarakat.
8. Menciptakan Pemerintahan Desa yang bersih, Jujur,Transparan , Akuntable dan kreaktif , Inovatif teknologi modern.
9. Menata beografi , profil dan informasi desa untuk mengwujudkan “MOTTO DESA PEMARON BALI NYAMAN ” BERSIH, AMAN, LESTARI, INDAH, SEHAT, SEJAHTRA , NYAMAN, MAJU DAN MANDIRI ”

BAB II

KEBIJAKAN PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA DAN PELAKSANAANYA

A. Kebijakan Program Kerja dan Pelaksanaan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Program kerja penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan kepada terlaksananya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Selain itu program kerja penyelenggaraan pemerintahan desa juga mengacu kepada Peraturan Desa Pemaron Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020-2027 dan Peraturan Desa Pemaron Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025.

Peraturan Perundang-undangan

- 1. Jumlah Peraturan Desa yang dibuat selama tahun 2025 sebanyak 6 dengan daftar rincian terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari LKPPD ini.
- 2. Jumlah Peraturan Perbekel yang dibuat selama Tahun 2024 sebanyak 6 Peraturan dengan daftar rincian terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari LKPPD ini.
- 3. Jumlah Keputusan Perbekel yang dibuat selama tahun 2024 sebanyak 34 dengan daftar rincian terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari LKPPD ini.

B. Kependudukan

1. JUMLAH

Jumlah laki-laki	2809 orang
Jumlah perempuan	2739 orang
Jumlah total -	5548 orang
Jumlah kepala keluarga	1761KK
Kepadatan Penduduk	per km

2. USIA

USIA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		USIA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN	
0-12 bulan	13	Org	23	Org	39 tahun	42	Org	34	Org
1 tahun	31	Org	33	Org	40 tahun	40	Org	45	Org
2 tahun	44	Org	43	Org	41 tahun	41	Org	31	Org
3 tahun	36	Org	31	Org	42 tahun	34	Org	39	Org
4 tahun	32	Org	31	Org	43 tahun	29	Org	35	Org
5 tahun	53	Org	41	Org	44 tahun	29	Org	45	Org
6 tahun	59	Org	42	Org	45 tahun	35	Org	34	Org
7 tahun	44	Org	38	Org	46 tahun	33	Org	38	Org

8 tahun	45	Org	47	Org	47 tahun	36	Org	30	Org
9 tahun	47	Org	65	Org	48 tahun	41	Org	33	Org
10 tahun	53	Org	49	Org	49 tahun	26	Org	34	Org
11 tahun	56	Org	48	Org	50 tahun	38	Org	47	Org
12 tahun	44	Org	48	Org	51 tahun	34	Org	34	Org
13 tahun	48	Org	42	Org	52 tahun	38	Org	53	Org
14 tahun	45	Org	39	Org	53 tahun	43	Org	39	Org
15 tahun	48	Org	48	Org	54 tahun	32	Org	41	Org
16 tahun	48	Org	39	Org	55 tahun	30	Org	32	Org
17 tahun	49	Org	41	Org	56 tahun	51	Org	38	Org
18 tahun	45	Org	49	Org	57 tahun	23	Org	24	Org
19 tahun	55	Org	39	Org	58 tahun	17	Org	32	Org
20 tahun	46	Org	42	Org	59 tahun	40	Org	38	Org
21 tahun	52	Org	45	Org	60 tahun	21	Org	22	Org
22 tahun	53	Org	37	Org	61 tahun	62	Org	33	Org
23 tahun	50	Org	49	Org	62 tahun	26	Org	26	Org
24 tahun	52	Org	50	Org	63 tahun	25	Org	22	Org
25 tahun	50	Org	57	Org	64 tahun	23	Org	22	Org
26 tahun	46	Org	45	Org	65 tahun	25	Org	39	Org
27 tahun	49	Org	52	Org	66 tahun	21	Org	21	Org
28 tahun	39	Org	44	Org	67 tahun	14	Org	19	Org
29 tahun	35	Org	47	Org	68 tahun	14	Org	17	Org
30 tahun	40	Org	45	Org	69 tahun	15	Org	18	Org
31 tahun	47	Org	45	Org	70 tahun	10	Org	16	Org
32 tahun	46	Org	42	Org	71 tahun	13	Org	12	Org
33 tahun	48	Org	46	Org	72 tahun	14	Org	17	Org
34 tahun	45	Org	38	Org	73 tahun	18	Org	16	Org
35 tahun	29	Org	36	Org	74 tahun	8	Org	16	Org
36 tahun	41	Org	51	Org	75 tahun	6	Org	18	Org
37 tahun	42	Org	46	Org	> 75 tahun	47	Org	50	Org
38 tahun	43	Org	38	Org	Total		2780 Org		2739Org

C. Pendidikan

Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	35 orang	320 orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	198 orang	156 orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	10 orang	15 orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	407 orang	174 orang
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	156 orang	78 orang
Usia 18-56 thn pernah SD tetapi tidak tamat	128 orang	123 orang
Tamat SD/ sederajat	344 orang	542 orang
Jumlah usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTP	29 orang	6 orang
Jumlah usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTA	20 orang	5 orang
Tamat SMP/ sederajat	264 orang	280 orang
Tamat SMA/ sederajat	754 orang	652 orang
Tamat D-1/ sederajat	60 orang	26 orang
Tamat D-2/ sederajat	46 orang	24 orang
Tamat D-3/ sederajat	68 orang	78 orang
Tamat S-1/ sederajat	247 orang	257 orang
Tamat S-2/ sederajat	31 orang	16 orang
Tamat S-3/ sederajat	2 orang	1 orang
Tamat SLB A	orang	orang
Tamat SLB B	orang	orang
Tamat SLB C	orang	orang
Jumlah	2809 orang	2739 orang
Jumlah Total		5548 orang

D. MATA PENCAHARIAN POKOK

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	30 orang	12 orang
Buruh tani	5 orang	1 orang
Buruh migran perempuan	orang	orang
Buruh migran laki-laki	orang	orang
Pegawai Negeri Sipil	139 orang	125 orang
Pengrajin industri rumah tangga	orang	orang
Pedagang keliling	orang	orang
Peternak	orang	orang
Nelayan	22 orang	1 orang
Montir	3 orang	0 orang
Dokter swasta	1 orang	2 orang
Bidan swasta	orang	1 orang
Perawat swasta	orang	orang
Pembantu rumah tangga	orang	1 orang
TNI	10 orang	orang
POLRI	44 orang	1 orang
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	55 orang	10 orang
Pengusaha kecil dan menengah	3 orang	7 orang
Pengacara	1 orang	orang
Notaris	37 orang	1 orang
Dukun Kampung Terlatih	orang	orang
Jasa pengobatan alternatif	orang	orang
Dosen swasta	4 orang	orang
Pengusaha besar	orang	orang
Arsitektur	orang	orang
Seniman/Artis	1 orang	orang
Karyawan perusahaan swasta	469 orang	296 norang
Karyawan perusahaan pemerintah	23 orang	20 orang
Wiraswasta	302 orang	141 orang
Wartawan	orang	orang
Transportasi	8 orang	orang
Pedagang	23 orang	124 orang
Perawat	orang	4 orang
Pelajar/Mahasiswa	440 orang	360 orang
Dll	1194 orang	1636 orang
	orang	orang
jumlah	2809 orang	2739 orang
Jumlah Total Penduduk 5548 orang		

E. AGAMA/ALIRAN KEPERCAYAAN

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	302 orang	304 orang
Kristen	94 orang	109 orang
Katholik	61 orang	45 orang
Hindu	2249 orang	2229 orang
Budha	80 orang	67 orang
Khonghucu	orang	orang
Kepercayaan Kepada Tuhan YME	orang	orang
Aliran Kepercayaan lainnya	orang	orang
Jumlah	2809 orang	2739 orang

F. KEWARGANEGARAAN

Kewarganegaraan	Laki-laki	Perempuan
Warga Negara Indonesia	2799 orang	2739 orang
Warga Negara Asing	2 orang	orang
Dwi Kewarganegaraan	orang	orang
Jumlah	2809 orang	2739 orang

G. LEMBAGA PEMERINTAHAN

PEMERINTAH DESA/KELURAHAN		
Dasar hukum pembentukan Pemerintah Desa / Kelurahan	Ada/ Tidak	Perda/Keputusan Bupati/Camat/Belum Ada Dasar Hukum
Dasar hukum pembentukan BPD	Ada/ tidak	Perda/Keputusan Bupati/Camat/Be lum Ada Dasar Hukum
Jumlah aparat pemerintahan Desa/Kelurahan	10 orang	
Jumlah perangkat desa/kelurahan	10 unit kerja	
Kepala Desa/Lurah	Ada/ tidak	
Sekretaris Desa/Kelurahan	Ada/ tidak	
Kepala Urusan Pemerintahan	Ada/ tidak – Aktif/ tidak	
Kepala Urusan Pembangunan	Ada/ tidak – Aktif/ tidak	
Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat	Ada/ tidak – Aktif/ tidak	
Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat	Ada/ tidak – Aktif/ tidak	
Kepala Urusan Umum	Ada/ tidak – Aktif/ tidak	
Kepala Urusan Keuangan	Ada/ tidak – Aktif/ tidak	
Jumlah Staf	4 orang	
Jumlah Dusun di Desa/Lingkungan di Kelurahan atau sebutan lain	2 dusun/lingkungan Aktif/ tidak	
Kepala Dusun/Banjar Dinas Dangin Margi	Aktif/ tidak	
Kepala Dusun/ Banjar Dinas Dauh Margi	Aktif/ tidak	
Tingkat Pendidikan Aparat Desa/Kelurahan	SMA, S1	
Kepala Desa/Lurah	SMA	
Sekretaris Desa/Kelurahan	SMA	
Kepala Urusan Pemerintahan	SMA	
Kepala Urusan Perencanaan	SMA	
Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat	S1	
Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat	S1	
Kepala Urusan Umum	S1	
Kepala Urusan Keuangan	SMA	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Keberadaan BPD	Ada/ tidak
Jumlah Anggota BPD	5 orang
Pendidikan Anggota BPD	SMA, S1
Ketua : Drs Gede Artana	S1
Wakil Ketua : Gede Made Susila Budi D	SMA
Sekretaris : Putu Sri Puji	S1
Anggota, Nama : Ketut Putra	SMA
Anggota, Nama : Putu Suardika	SMA

E. Pertanahan

1. Batas Wilayah

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Pantai	
Sebelah selatan	Desa Panji Anom	Sukasada
Sebelah timur	Desa Baktiseraga	Buleleng
Sebelah barat	Desa Tukadmungga	Buleleng

2. Penetapan Batas dan Peta Wilayah

Penetapan Batas	Dasar Hukum	Peta Wilayah
Sudah ada/belum ada	Perdes No -	Ada/ tidak

3. Luas wilayah menurut penggunaan

Luas pemukiman	71.00 ha/m2
Luas persawahan	15.00..ha/m2
Luas perkebunan	7.00..ha/m2
Luas kuburan	0.10 .ha/m2
Luas pekarangan	40.00 ha/m2
Luas taman	0ha/m2
Perkantoran	8.00 ha/m2
Luas prasarana umum lainnya	5,00..ha/m2
Total luas	146.00 ha/m2

TANAH SAWAH	
Sawah irigasi teknis	15.85 .ha/m2
Sawah irigasi ½ teknis	0 ha/m2
Sawah tadah hujan	0 ha/m2
Sawah pasang surut	ha/m2
Total luas	15.85 .ha/m2

TANAH KERING	
Tegal/ladang	0 ha/m2
Pemukiman	0 ha/m2
Pekarangan	0 ha/m2
Total luas	0 ha/m2

TANAH BASAH	
Tanah rawa	0 ha/m2
Pasang surut	0 ha/m2
Lahan gambut	0 ha/m2
Situ/waduk/danau	0 ha/m2
Total luas	

TANAH PERKEBUNAN	
Tanah perkebunan rakyat	0 ha/m2
Tanah perkebunan negara	0 ha/m2
Tanah perkebunan swasta	0 ha/m2
Tanah perkebunan perorangan	7.00...ha/m2
Total luas	7.00 ha/m2

TANAH FASILITAS UMUM	
Kas Desa/Kelurahan:	0 ha/m2
a. Tanah bengkok	0 ha/m2
b. Tanah titi sara	0 ha/m2
c. Kebun desa	0 ha/m2
d. Sawah desa	0 ha/m2
Lapangan olahraga	0 ha/m2
Perkantoran pemerintah	0 ha/m2
Ruang publik/taman kota	0 ha/m2

Tempat pemakaman desa/umum	0 ha/m2
Tempat pembuangan sampah	0 ha/m2
Bangunan sekolah/ perguruan tinggi	0 ha/m2
Pertokoan	0 ha/m2
Fasilitas pasar	0 ha/m2
Terminal	0 ha/m2
Jalan	0 ha/m2
Daerah tangkapan air	0 ha/m2
Usaha perikanan	0 ha/m2
Sutet/aliran listrik tegangan tinggi	0 ha/m2
Total luas	0 ha/m2

HUTAN	
Hutan lindung	0 ha/m2
Hutan produksi	0 ha/m2
a. Hutan produksi tetap	0 ha/m2
b. Hutan terbatas	0 ha/m2
Hutan konservasi	0 ha/m2
Hutan adat	0 ha/m2
Hutan asli	0 ha/m2
Hutan sekunder	0 ha/m2
Hutan buatan	0 ha/m2
Hutan mangrove	0 ha/m2
Hutan suaka	0 ha/m2
a. Suaka alam	0 ha/m2
b. Suaka margasatwa	0 ha/m2
Hutan rakyat	0 ha/m2
Total luas	0 ha/m2

4. Iklim

Curah hujan	1321-2929...Mm
Jumlah bulan hujan	5 . bulan
Kelembapan	79% -87 %
Suhu rata-rata harian	26.9 -31.6.°C
Tinggi tempat dari permukaan laut	2-10.mdl

5. Jenis dan kesuburan tanah

Warna tanah (sebagian besar)	Merah/Hitam/ Kuning/ Abu-abu
Tekstur tanah	Lampungan/ Pasiran/ Debu
Tingkat kemiringan tanah	0,3 ..derajat
Lahan kritis	0 ha/m2
Lahan terlantar	0 ha/m2
Tingkat erosi tanah	
Luas tanah erosi ringan	0 ha/m2
Luas tanah erosi sedang	0 ha/m2
Luas tanah erosi berat	0 ha/m2
Luas tanah yang tidak ada erosi	0 ha/m2

F. TOPOGRAFI

1. Bentangan wilayah

Desa/kelurahan dataran rendah	Ya/ tidak	100 ha/m2
Desa/kelurahan berbukit-bukit	Ya/ tidak	0 ha/m2
Desa/kelurahan dataran tinggi/ pegunungan	Ya/ tidak	0 ha/m2
Desa/kelurahan lereng gunung	Ya/ tidak	0 ha/m2
Desa/kelurahan tepi pantai/ pesisir	Ya/ tidak	46 ha/m2
Desa/kelurahan kawasan rawa	Ya/ tidak	0 ha/m2
Desa/kelurahan kawasan gambut	Ya/ tidak	0 ha/m2

Desa/kelurahan aliran sungai	Ya /tidak	0 ha/m2
Desa/kelurahan bantaran sungai	Ya /tidak	0 ha/m2

2. Letak

Desa/kelurahan kawasan perkantoran	Ya /tidak	0 ha/m2
Desa/kelurahan kawasan pertokoan/bisnis	Ya /tidak	0 ha/m2
Desa/kelurahan kawasan campuran	Ya/ tidak	0 ha/m2
Desa/kelurahan kawasan industri	Ya /tidak	0 ha/m2
Desa/Kelurahan kepulauan	Ya /tidak	0 ha/m2
Desa/Kelurahan pantai/pesisir	Ya /tidak	0 ha/m2
Desa/Kelurahan kawasan hutan	Ya /tidak	0 ha/m2
Desa/Kelurahan taman suaka	Ya /tidak	0 ha/m2
Desa/Kelurahan kawasan wisata	Ya /tidak	0 ha/m2
Desa/Kelurahan perbatasan dengan negara lain	Ya /tidak	0 ha/m2
Desa/Kelurahan perbatasan dengan provinsi lain	Ya/tidak	0 ha/m2
Desa/Kelurahan perbatasan dengan kabupaten lain	Ya /tidak	0 ha/m2
Desa/Kelurahan perbatasan antar kecamatan lain	Ya /tidak	0 ha/m2
Desa/kelurahan DAS/bantaran sungai	Ya /tidak	0 ha/m2
Desa/kelurahan rawan banjir	Ya/tidak	0 ha/m2
Desa/kelurahan bebas banjir	Ya/tidak	0 ha/m2
Desa/kelurahan potensial tsunami	Ya/tidak	0 ha/m2
Desa/kelurahan rawan jalur gempa bumi	Ya/tidak	0 ha/m2

Orbitasi		
Jarak ke ibu kota kecamatan	5 Km	
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor	0.10 Jam	
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor	0.30 Jam	
Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan	 unit	Ada/tidak
Jarak ke ibu kota kabupaten/kota	5 ... Km	
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor	0.10 Jam	
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor	0.30 Jam	
Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/kota	 unit	Ada/tidak
Jarak ke ibu kota provinsi	115 . Km	
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor	2.5 Jam	
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor	2.4 . Jam	
Kendaraan umum ke ibu kota provinsi	 unit	Ada/tidak

G. LEMBAGA KEAMANAN

1. Hansip dan Linmas	
Keberadaan Hansip dan Linmas	Ada/ tidak
Jumlah anggota Hansip	- orang
Jumlah anggota Satgas Linmas	32 orang
Pelaksanaan SISKAMLING	Ada/ tidak
Jumlah Pos Kamling	10 buah
2. Satpam Swakarsa	
Keberadaan SATPAM SWAKARSA	Ada/ Tidak

Jumlah anggota	orang
Nama organisasi induk	
Pemilik organisasi	Pemerintah/Swasta /Organisasi
Keberadaan organisasi keamanan lainnya	Ada/tidak

3. Kerjasama Desa/Kelurahan dengan TNI – POLRI dalam Bidang TRANTIBLINMAS	
Mitra Koramil / TNI	Ada/tidak
Jumlah anggota	1 Orang
Jumlah kegiatan	jenis kegiatan
Babinkamtibmas / POLRI	Ada/tidak
Jumlah anggota	1 Orang
Jumlah kegiatan	jenis kegiatan

B.Kebijakan Program Kerja dan Pelaksanaan Bidang Pembangunan

Dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa, Pemerintah Desa Pemaron terkonsentrasi kepada pembangunan infrastruktur desa yang sesuai dengan ketentuan dan indikator. Selain itu program kerja pelaksanaan pembangunan desa juga mengacu pada Peraturan Desa Pemaron Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020-2027 dan Peraturan Desa Pemaron Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 yang meliputi Pembangunan:

- a. Sarana Prasarana Desa
- b. Pembangunan Sarana Pendidikan
- c. Pembangunan Sarana Kesehatan
- d. Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan
- e. Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman

Pada tahun 2025, program pembangunan yang berhasil dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/MadrasahNonFormal
2. Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan PAUD
3. Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Praga PAUD/TK
4. Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
5. Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
6. Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
7. Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
8. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD
9. Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa

10. Kegiatan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
11. Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong – gorong, selokan, drainase, dll)
12. Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Gorong – gorong, selokan, drainase, dll)
13. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
14. Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pemeliharaan Monumen/ Gapura Batas Desa
15. Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa
16. Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Milik Desa
17. Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
18. Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa

C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan

Dalam pelaksanaan program pembinaan kemasyarakatan, Pemerintah Desa Pamaron terkonsentrasi kepada pembinaan yang sesuai dengan ketentuan dan indikator Peraturan Bupati Buleleng nomor 47 tahun 2014 tentang Gerakan Desa/kelurahan Sehat dan Cerdas. Selain itu program kerja pembinaan kemasyarakatan juga mengacu pada Peraturan Desa Pamaron Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020—2027 dan Peraturan Desa Pamaron Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025.

Pada tahun 2025, program pembinaan yang berhasil dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan Lembaga Pendidikan
2. Pembinaan Lembaga Kesehatan
3. Pembinaan Lembaga Keagamaan
4. Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
5. Pembinaan Karang Taruna
6. Pembinaan Penguatan Kebangsaan pada Lembaga Linmas
7. Pembinaan Ketua Lingkungan RT

Adapun kegiatan pembinaan dilakukan minimal 2 kali dalam satu tahun.

D. Program Kerja dan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Program kerja pemberdayaan masyarakat mengacu pada Peraturan Desa Pamaron Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020-2027 dan Peraturan Desa Pamaron Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun

2025. Pada tahun 2025, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Pemerintah Desa Pamaron terkonsentrasi kepada kegiatan antara lain:

1. Pemberdayaan lembaga perempuan seperti PKK, KWT.
2. Pemberdayaan terhadap Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) seperti Posyandu, Posbindu, Vaksin Masal, dan Puskesmas, demi meningkatkan pelayanan dasar kesehatan masyarakat.
3. Pemberdayaan Lembaga Sosial, Perpustakaan Desa dan pembinaan terhadap peningkatan pengembangan Teknologi Informasi (Internet Desa).
4. Pemberdayaan Lembaga Kebudayaan Desa, guna melestarikan kebudayaan dan kearifan lokal di Desa Pamaron.

A. Pengelolaan Pendapatan Desa

Dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa Pemaron telah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan terbuka (*Open Government*). Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa pada tahun berkenan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan desa yang meliputi Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-lain. Selain pengelolaan dengan sistem terbuka dan akuntabel, agar kebijakan pengelolaan keuangan desa lebih terarah maka pemerintah Desa Pemaron telah melakukan perencanaan,penatausahaan,pelaporan dan pertanggungjawaban tentang APBDesa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Camat pada setiap akhir tahun. Sebagai implementasi dari peraturan dan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan **Peraturan Desa Pemaron Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025** dengan rincian sebagai berikut:

PENDAPATAN			
1	PENDAPATAN ASLI DESA	Rp.	30.500.000,00
	- Hasil Usaha Desa	Rp.	5.000.000,00
	- Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	Rp.	0,00
	- Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	Rp.	25.500.000,00

2	PENDAPATAN TRANSFER	Rp.	2.836.494.652,00
	- Dana Desa	Rp.	981.820.000,00
	- Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp.	436.092.290,00
	- Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp.	39.454.105,00
	- Alokasi Dana Desa	Rp.	575.977.757,00
	- Bantuan Keuangan Provinsi	Rp.	67.800.000,00
	- Bantuan Kabupaten/ Kota	Rp.	735.350.500,00
3	PENDAPATAN LAIN - LAIN	Rp.	55.000.000,00
	- Hibah dan Sumbangan dari Pihak ke-3 yang tidak mengikat	Rp.	50.500.000,00
	- Bunga Bank	Rp.	4.500.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp.	2.921.994.652,00

Setelah APBDesa disahkan bersama BPD, Pemerintah Desa mulai menjalankan kegiatan pemerintahan. Dan dikarenakan ada perubahan pendapatan sehingga mempengaruhi kebijakan belanja, maka Pemerintah Desa bersama BPD menyepakati Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2025.

Setelah tahun anggaran berakhir, Pemerintah Desa membuat Laporan Pertanggungjawaban yang ditetapkan dalam **Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2026 tentang Laporan Pertanggung jawaban Realisasi APBDDesa Tahun 2025**, sekaligus dilampirkan Laporan Kekayaan Milik Desa (LKMD) dan Program Sektoral dan Program Daerah yang Masuk ke Desa dengan rincian sebagai berikut:

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025 Desa Pemaron Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng terdiri atas :

URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
A. PENDAPATAN DESA		
Pendapatan Asli Desa	Rp30,500,000.00	Rp24,757,974.00
Pendapatan Transfer	Rp2,836,494,652.00	Rp2,659,092,953.00
1. Dana Desa	Rp981,820,000.00	Rp981,820,000.00
2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp475,546,395.00	Rp373,206,196.00
3. Alokasi Dana Desa	Rp575,977,757.00	Rp575,977,757.00
4. Bantuan Keuangan Provinsi	Rp67,800,000.00	Rp67,800,000.00
5. Bantuan Keuangan Kabupaten / Kota	Rp735,350,500.00	Rp660,289,000.00
Pendapatan Lain - lain	Rp55,000,000.00	Rp27,175,539.45
JUMLAH PENDAPATAN	Rp2,921,994,652.00	Rp2,711,026,466.45
B. BELANJA DESA		
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	Rp1,134,578,236.12	Rp922,505,397.00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Rp1,458,918,000.00	Rp1,305,131,500.00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Rp234,596,224.11	Rp112,990,000.00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Rp16,650,000.00	Rp7,750,000.00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, DAN MENDESAK DESA	Rp109,174,525.99	Rp108,000,000.00
JUMLAH BELANJA	Rp2,953,916,986.22	Rp2,456,376,897.00
SURPLUS / (DEFISIT)	(31,922,334.22)	254,649,569.45
SILPA	Rp236,922,334.22	Rp236,922,336.22
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan	-	-
C. PEMBIAYAAN DESA		
Penerimaan Pembiayaan	Rp236,922,334.22	Rp236,922,336.22
Pengeluaran Pembiayaan	Rp205,000,000.00	Rp205,000,000.00
PEMBIAYAAN NETTO	Rp31,922,334.22	Rp31,922,336.22
SILPA TAHUN 2025 (Pagu Anggaran-Realisasi)	Rp0.00	Rp286,571,905.67

Laporan Kekayaan Milik Desa sampai 31 Desember 2025 berupa:

- 1. Aset Lancar : Rp. 825.965.396,00
- 2. Investasi : Rp. 50.000.000,00
- 3. Aset Tetap : Rp 24.875.000,00
- 3. Dana Cadangan : Rp. 0,-
- 4. Aset Tidak Lancar lainnya : Rp 0,-
- 5. Kewajiban jangka pendek : Rp. 0,-

Program Sektoral dan Program Daerah yang Masuk ke Desa tahun 2025 sebesar **Rp. 0,-**

B. Pengelolaan Belanja Desa

Dalam kebijakan belanja, pemerintah desa mengacu kepada prinsip efisien dan akuntabel dengan keterpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan mengutamakan kepada usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musrenbang Desa yang dituangkan ke dalam RKP Desa. Adapun Rincian Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 13 terdiri dari :

- 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- 5. Belanja Tak Terduga.

Untuk Tahun Anggaran 2025 total Belanja Desa sebesar **Rp. 2.953.916.986,22** dengan komposisi sebagai berikut :

BELANJA		
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 1.134.578.236,12
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 1.458.918.000,00
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 234.596.224,11
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 16.650.000,00
	Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 109.174.525,99
	JUMLAH BELANJA	Rp. 2.953.916.986,22
	SURFLUS/ (DEFISIT)	(Rp. 31.922.334,22)

			BELANJA	ANGGARAN (Rp.)
1			PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 1.134.578.236,12
1	1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Rp. 782.673.236,12
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp. 77.400.000,00
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp. 385.020.000,00
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 0,00
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	Rp. 156.899.236,12
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD	Rp. 58.500.000,00
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	Rp. 5.000.000,00
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT	Rp. 17.600.000,00
1	1	08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Rp. 29.454.000,00
1	1	91	Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Propinsi Bali	Rp. 18.000.000,00
1	1	92	Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Propinsi Bali	Rp. 34.800.000,00
1	2		Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Rp. 170.330.000,00
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Rp. 170.330.000,00
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Rp. 0,00
1	3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Rp. 42.100.000,00
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)	Rp. 0,00
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	Rp. 14.500.000,00
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Rp. 27.600.000,00
1	4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Rp. 70.825.00,00
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	Rp. 2.875.000,00

1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	Rp.	0,00
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes,dll)	Rp.	1.825.000,00
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	Rp.	26.900.000,00
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	Rp.	1.050.000,00
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Rp.	1.050.000,00
1	4	10	Dukukngan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa	Rp.	9.600.000,00
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan & pengiriman kontingen	Rp.	27.525.000,00
1	5		Pertanahan	Rp.	68.650.000,00
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Rp.	40.000.000,00
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Rp.	28.650.000,00
2			PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Rp.	1.458.918.000,00
2	1		Pendidikan	Rp.	108.250.000,00
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	Rp.	91.250.000,00
2	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	Rp.	0,00
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Rp.	17.000.000,00
2	2		Kesehatan	Rp.	100.360.00,00
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Rp.	74.835.000,00
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk masy, tenaga dan kader kesehatan)	Rp.	3.750.000,00
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp.	11.175.000,00
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngadaan Sarana/Prasarana Posyandu	Rp.	10.600.000,00
2	3		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp.	976.194.000,00

2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa	Rp.	341.355.000,00
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Rp.	168.399.600,00
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/selokan/parit/drainase dll)	Rp.	0,00
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Rp.	448.945.000,00
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Rp.	1.400.000,00
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Permukiman Gang	Rp.	16.094.000,00
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Rp.	0,00
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan monumen/Gapura/Batas Desa	Rp.	0,00
2	4		Kawasan Permukiman	Rp.	204.514.000,00
2	4	7	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Rp.	170.925.000,00
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	Rp.	33.589.000,00
2	5		Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Rp.	24.200.000,00
2	5	2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Rp.	24.200.000,00
2	6		Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Rp.	45.400.000,00
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	Rp.	45.400.000,00
3			PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	Rp.	234.596.224,11
3	1		Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Rp.	43.220.500,00
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)	Rp.	43.220.500,00
3	2		Kebudayaan dan Keagamaan	Rp.	101.150.724,11
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Rp.	5.800.000,00
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt.Kec/Kab/Kot)	Rp.	14.000.000,00
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Rp.	81.350.724,11
3	3		Kepemudaan dan Olah Raga	Rp.	30.000.000,00
3	3	01	Pengiriman kontingen kepemudaan & Olahraga sebagai wakil desa tkt kec/kab/kota	Rp.	30.000.000,00

3	3	04	Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa	Rp.	0,00
3	4		Kelembagaan Masyarakat	Rp.	60.225.000,00
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat	Rp.	15.000.000,00
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp.	7.975.000,00
3	4	03	Pembinaan PKK	Rp.	37.250.000,00
4			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Rp.	16.650.000,00
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp.	0,00
4	1	05	Bantuan Perikanan(Bibit/Pakan/dll)	Rp.	0,00
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp.	5.000.000,00
4	2	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/ pengelolaan/ penggilingan)	Rp.	5.000.000,00
4	2	2	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/ pengelolaan/ kandang)	Rp.	0,00
4	3		Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp.	11.650.000,00
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Rp.	2.600.000,00
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Rp.	9.050.000,00
5			PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	Rp.	109.174.525,99
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Rp.	1.174.525,99
5	1	00	Penanggulangan Bencana	Rp.	1.174.525,99
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	Rp.	108.000.000,00
5	3	00	Penanganan Keadaan Mendesak	Rp.	108.000.000,00
JUMLAH BELANJA				Rp.	2.953.916.986,22

Setelah tahun anggaran berakhir, Pemerintah Desa membuat Laporan Pertanggungjawaban yang ditetapkan dalam **Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2026 tentang Laporan Pertanggung jawaban Realisasi APBDDesa Tahun 2025**, Laporan Realisasi Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025 Desa Pemaron Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng terdiri atas :

BELANJA		
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 922.505.397,00
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 1.305.131.500,00
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 112.990.000,00
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 7.750.000,00
	Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 108.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	Rp. 2.456.376.897,00

	SURFLUS/ (DEFISIT)	Rp.	254.649.569,45
--	----------------------------	------------	-----------------------

C. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- a) Penerimaan Pembiayaan; dan
- b) Pengeluaran Pembiayaan

Untuk Tahun Anggaran 2025 total pembiayaan sebesar **Rp. 31.922.336,22** dengan rincian sebagai berikut :

	PEMBIAYAAN	ANGGARAN
	A. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 236.922.336,22
	B. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 205.000.000,00
	SELISIH PEMBIAYAAN (A-B)	Rp. 31.922.336,22

SILPA AKHIR TAHUN Rp. 286.571.905,67

BAB IV

KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

A. Keberhasilan yang dicapai

Selama Tahun 2025 Pemerintah Desa Pemaron terbilang cukup berhasil, dengan berbagai prestasi yang telah diarahi, adapun keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah desa meliputi:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pemaron telah berhasil mempertahankan tertib administrasi.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pada tahun 2025 kegiatan pembangunan sudah terlaksana.

3. Pembinaan Kemasyarakatan :

Di bidang pembinaan kemasyarakatan desa, keberhasilan yang dicapai pada sektor pembinaan lembaga kesehatan, pendidikan, keagamaan, sosial budaya, ekonomi, dan pembinaan penguatan kebangsaan, serta pembinaan pemuda dan kegiatan olah raga.

4. Pemberdayaan Masyarakat :

Keberhasilan yang dicapai dibidang pemberdayaan masyarakat antara lain adalah pemberdayaan lembaga Perempuan (PKK) dan pemberdayaan dibidang kesehatan (Ponkesdes) dengan kegiatan terkonsentrasi pada Posyandu sebagai pelayanan dasar kesehatan masyarakat atau dengan istilah pemberdayaan Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM). Serta pemberdayaan BUMDesa sebagai bentuk peningkatan bidang ekonomi.

5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat

Keberhasilan yang dicapai dibidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat antara lain adalah Penyemprotan PMK, Pembagian Sembako, penyaluran BLT Dana Desa Kepada 30 KPM selama selama 12 bulan.

B. Permasalahan Yang Dihadapi Dan Upaya Yang Ditempuh

Di samping keberhasilan dan prestasi yang dicapai Pemerintah Desa Pemaron, tentu juga masih terdapat permasalahan yang dihadapi diantaranya masalah pembangunan

dan SDM, baik SDM Pemerintah Desa, Lembaga Desa, maupun warga Desa Pemaron secara umum.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa selama tahun 2025 antara lain:

1. Pesatnya perkembangan peraturan perundang-undangan, utamanya yang bersifat multitafsir, akan menghambat percepatan terwujudnya pelaksanaan roda pemerintahan desa demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk meminimalisir permasalahan tersebut, Pemerintah Desa selalu melakukan koordinasi dan konsultasi baik kepada Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten.

2. Keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) akan berpengaruh pada penerapan prinsip kehati-hatian yang berlebihan yang berdampak pada produktifitas kinerja aparat penyelenggara pemerintahan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Desa melakukan pembinaan dan rapat-rapat koordinasi serta memberikan bekal untuk meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan.

3. Masalah pembangunan juga masih memerlukan penanganan serius, terutama pada kurangnya sumber dana untuk pelaksanaan pembangunan. Di mana dana yang ada masih jauh lebih kecil dari

besarnya usulan warga pada Musrenbang Desa, sehingga menimbulkan kesan bahwa usulan warga banyak yang diabaikan ataupun pembangunan dirasa kurang adil dan kurang merata antara satu tempat dengan tempat yang lain.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang ditempuh Pemerintah Desa adalah mencari bantuan dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk menutupi kekurangan dana tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Demikian penjelasan mengenai Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun 2025. Pada intinya, Pemerintah Desa Pemaron sudah berusaha melaksanakan kegiatan pemerintahan desa dengan sebaik-baiknya, baik Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, maupun Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Namun kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam mengemban tugas melaksanakan kegiatan pemerintahan desa masih terdapat kekurangan dan masih banyak hal-hal yang belum dituntaskan. Untuk itu secara pribadi atau atas nama Pemerintah Desa Pemaron menyampaikan permintaan maaf yang setulus-tulusnya kepada seluruh elemen mulai Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, dan masyarakat Desa Pemaron tentunya.

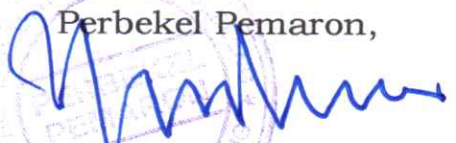
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak baik pemerintah desa maupun lembaga desa atas kerja samanya dan semua pihak yang telah mendukung penyelesaian LKPPD ini, dengan harapan semoga laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh BPD.

B. Saran

Seiring dengan harapan dalam hal ini Menteri Desa dan Menteri Keuangan yang menginginkan Desa Cermat dan Cepat dalam Penyerapan Anggaran maka dengan ini kami tanpa mengurangi rasa hormat memberikan saran agar Pemerintah Kabupaten tidak lambat dalam Penetapan Pagu Anggaran sehingga Desa dapat dengan cepat menyelesaikan Perencanaan Kegiatan pada tahun berikutnya.

Demi Kelancaran Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kami dari Pemerintah Desa sangat antusias sekali jika Pemerintah Kabupaten atau Dinas terkait selalu berupaya meningkatkan Kapasitas Aparat Desa khususnya tentang Pengelola Keuangan.

Pemaron, 10 Maret 2026
Perbekel Pemaron,


PUTU MERTAYASA



LAMPIRAN

LAPORAN KEPENDUDUKAN
PEMERINTAH DESA PEMARON KECAMATAN BULELENG KAB. BULELENG
AKHIR TAHUN 2025

No	Jumlah Penduduk Awal Tahun 2024					Jumlah Penduduk Akhir Tahun 2024					Ket
	L	P	Jumlah	KK	KSK	L	P	Jumlah	KK	KSK	
1.	2758	2712	5470	1679		2809	2739	5548	1761		Jumlah penduduk pada akhir tahun berkurang 78 jiwa dan 82 KK

Pemaron, 10 Maret 2026

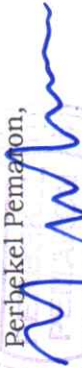
Perbekel Pemaron



PUTU MERTAYASA

DAFTAR PERATURAN DESA PEMARON TAHUN 2025

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan Desa	Tanggal	Ket
1	1 Tahun 2025	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024	16 Januari 2025	-
2	2 Tahun 2025	Pengelolaan Sampah	17 Februari 2025	-
3	3 Tahun 2025	Perubahan Perdes Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan BUMDesa Dharma Karya	28 Mei 2025	-
4	4 Tahun 2025	Penyertaan Modal BUMDesa "Dharma Karya"	04 Juni 2025	-
5	5 Tahun 2025	RKP Desa Tahun 2025	13 Juni 2025	-
6	6 Tahun 2025	APBDesa Tahun Anggaran 2026		-
7	7 Tahun 2025	Perubahan Kedua Atas peraturan Desa Nomor 6 tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025	16 Oktober 2025	
8	8 Tahun 2025	Perubahan RKP Desa Tahun 2026	30 Oktober 2025	
9	9 Tahun 2025	APBDesa Tahun 2026	31 Desember 2025	

Pemaron, 10 Maret 2026
Perbekel Pemaron,

PUTU MERTAYASA

